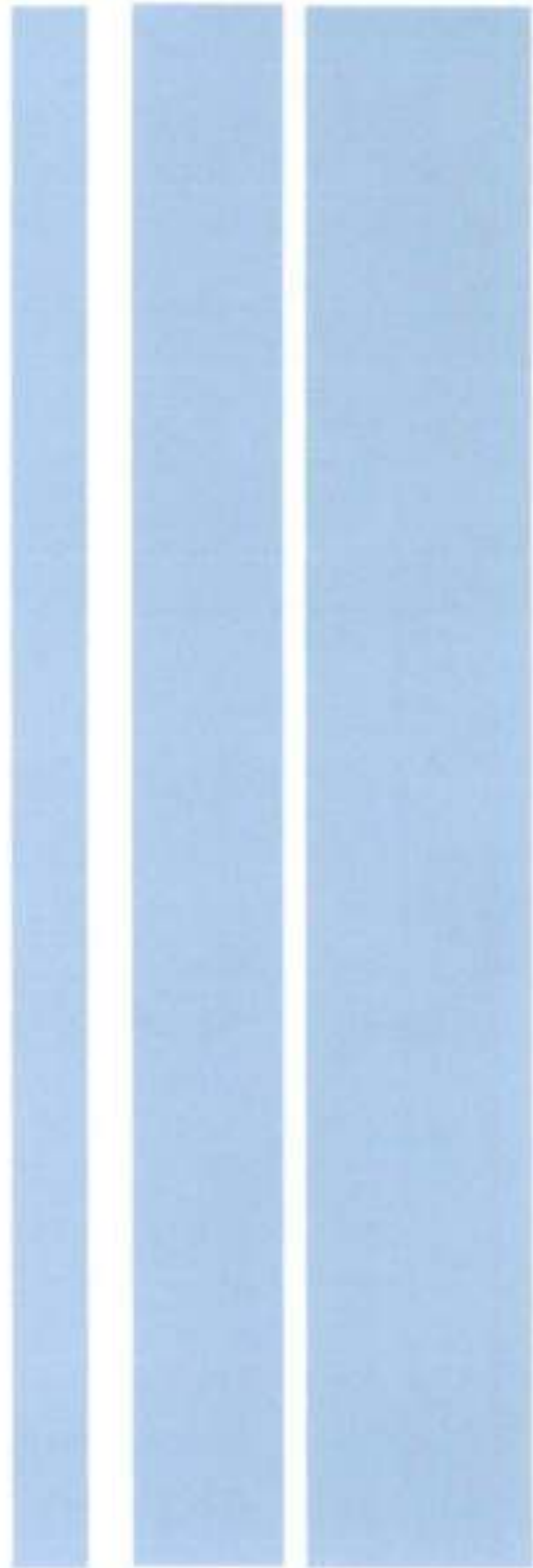




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2023 (Unaudited)

Jl Dr. Soetomo Pasiran
Singkawang Kalimantan Barat



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Singkawang, 31 Desember 2023
Sekretaris,

Arif Hidayat, S.Sos



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

Alamat : Jl. Dr. Soetomo Singkawang
Telp. (0562) 631947, 639254 Fax. (0562) 639255

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Singkawang, 31 Desember 2023

Sekretaris,



Arif Sunandar, S.Sos

NIP. 197702122007011006

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 12.228.472.660,- atau mencapai 99,38 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 12.305.070.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 11.861.815.702,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 10.572.260.892; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.287.153.970; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2.400.840,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 11.861.815.702,-;

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0, sedangkan

jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 11.406.762.224,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 11.406.762.224,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp3.359.854 dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp11.403.402.370,-,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.057.261.524,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp11.403.402.370,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.207.710.178,- kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp10.804.307.808,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp11.861.569.332,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	NDIV/0%	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	NDIV/0%	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.349.227.000	2.349.219.133	100,00	2.213.753.238
Belanja Barang	B.4	9.656.186.000	9.580.490.727	99,22	1.670.498.781
Belanja Modal	B.5	299.657.000	298.762.800	99,70	91.795.500
Belanja Bantuan Hibah	B.6	-	-	NDIV/0%	-
JUMLAH BELANJA		12.305.070.000	12.228.472.660	99,38	3.976.047.519

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	9.128.092.000	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	411.250.000	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	1.032.918.892	-
Jumlah Aset Lancar		10.572.260.892	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	2.252.544.882	1.867.833.082
Gedung dan Bangunan	C.16	905.430.190	905.430.190
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	11.950.000	11.950.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.882.771.102)	(1.731.734.258)
Jumlah Aset Tetap		1.287.153.970	1.051.479.014
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-lain	C.22	343.427.500	343.427.500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(341.026.660)	(339.644.990)
Jumlah Aset Lainnya		2.400.840	3.782.510
JUMLAH ASET		11.861.815.702	1.057.261.524
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	246.370	-
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		246.370	-
JUMLAH KEWAJIBAN		246.370	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	11.861.569.332	1.057.261.524
JUMLAH EKUITAS		11.861.569.332	1.057.261.524
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11.861.815.702	1.057.261.524

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.057.261.524	1.099.104.603
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11.403.402.370)	(4.016.225.596)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		22.207.710.178	3.974.382.519
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(10.804.307.808)	(41.843.079)
EKUITAS AKHIR	E.5	11.861.569.332	1.057.261.524

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Singkawang. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bersifat hierarkhis.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum dengan visi “ **Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai Penyelenggara yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia .**” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang

dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Aset

Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) kali revisi DIPA yang terakhir dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024,-

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.061.475.000	2.349.227.000
Belanja Barang	5.067.087.000	9.955.839.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Hibah	0	-
Jumlah Belanja	7.128.562.000	12.305.066.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0., dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pemindahtanganan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan jika dibandingkan dengan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Realisasi

Belanja Negara

Rp12.228.472.660

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp12.228.472.660 atau 99,33% dari anggaran belanja sebesar Rp12.305.070.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.349.227.000	2.349.219.133	100,00
Belanja Barang	9.656.186.000	9.580.490.727	99,22
Belanja Modal	299.857.000	298.762.800	99,64
Belanja Hibah	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Ketor	12.305.270.000	12.228.472.660	99,38
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	12.305.270.000	12.228.472.660	99,38

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 207,56% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan berkala dan pangkat Pegawai Negeri Sipil KPU Kota Singkawang.
2. Adanya Kegiatan-kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.349.219.133	2.213.753.238	6,12
Belanja Barang	9.580.490.727	1.670.498.781	473,51
Belanja Modal	298.762.800	91.795.500	225,47
Belanja Hibah	-	-	#DN/0!
Jumlah	12.228.472.660	3.976.047.519	207,56

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp2.349.219.133,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.349.219.133 dan Rp2.213.753.238,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pegawai yang ada di KPU Kota Singkawang

berjumlah 30 Pegawai terdiri dari : 5 orang Komisioner KPU, 12 Orang Pegawai Negeri Sipil Organik, 3 Orang SATPAM, 1 Orang Sopir, 2 Orang Tenaga Administrasi, 5 Tenaga Pendukung, 2 Orang Pramubhakti.

Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,87% persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena adanya kenaikan berkala dan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
2. Adanya Restrukturisasi anggaran yang mengakibatkan kenaikan anggaran.

*Perbandingan Belanja Pegawai yang berakhir
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	565.860.500	685.342.908	(14,95)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	797.679.100	401.365.250	88,74
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.363.540.000	1.066.708.158	27,83
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	1.363.540.000	1.066.708.158	27,83

Belanja

Barang

Rp9.580.490.727

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.580.490.727,- dan Rp1.670.498.781,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 473,51% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan adanya Dana Tahapan Pemilu 2024.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	141.029.900	352.975.500	(59,86)
Belanja Barang Non Operasional	6.175.594.229	15.640.000	39.385,90
Belanja Jasa	670.852.507	61.463.762	991,51
Belanja Pemeliharaan	294.751.270	141.186.030	45,02
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.105.692.302	1.031.850.489	134,11
Belanja Barang Peralatan Barang Konsumsi	281.970.520	67.584.000	317,21
Jumlah Belanja Kotor	9.580.496.727	1.670.498.781	473,61
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	9.580.496.727	1.670.498.781	473,61

*Belanja Modal
Rp298.762.800*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp298.762.800 dan Rp91.795.500. Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan karena adanya Belanja Modal Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A 2023	REALISASI T.A 2022	NAK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	298.762.800	91.795.500	225,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	298.762.800	91.795.500	225,47
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	298.762.800	91.795.500	225,47

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp298.762.800, sedangkan realisasi TA 2022 sebesar Rp91.795.500. Realisasi Belanja Modal TA 2023 tidak mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Modal TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya belanja modal peralatan dan mesin lainnya. Dengan rincian sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	0	32.652.500	-100,00
Peralatan Komputer	298.762.800	59.143.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	298.762.800	91.795.500	225,47
Kipas Angin disinfektan	0	0	-
Jumlah Belanja	298.762.800	91.795.500	225,47

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP tahun berjalan yang sudah dipertanggungjawabkan. Sisa Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan tersebut telah disetor tanggal 4 Desember 2023 setoran TUP tahun berjalan sebesar Rp 35.837,- dengan Nomor NTPN 0C1B61GC7PK76VDR 29

Desember 2023, setoran UP sebesar Rp 202,- dengan Nomor NTPN 702797NAMJSCKMH2, setoran TUP sebesar Rp 6.544.791,- dengan Nomor NTPN 876A22CPNKE26MK0

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp9.128.092.000,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp,- dan Rp9.128.092.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas berasal dari hibah Pilkada. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	9.128.092.000	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dan Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	9.128.092.000	-

*Belanja Di
Bayar Di Muka
Rp.411.250.000*

C.3 Belanja Di Bayar Di Muka

Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp411.250.000 dan Rp0. Belanja dibayar dimuka berasal dari sewa gudang logistik yang belum dibayarkan pada tanggal pelaporan. Sewa Gudang Logistik dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 5 Oktober 2025 sesuai SPK Nomor 31/PP.08.2-SP/6172/2023 tanggal 05 Oktober 2023 Nilai SPK sebesar Rp. 470.000.000,- dan telah dibuatkan jurnal penyesuaian khusus.

Rincian Belanja Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pembayaran Sewa Gudang Logistik	411.250.000	-
	-	-
Jumlah	411.250.000	-

*Persediaan
Rp1.032.918.892*

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.032.918.892 dan Rp0. Sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan Nomor 004/BA-OP/6172/2023 tanggal 31 Desember 2023, Berita Acara BMN untuk Inventarisasi Barang Milik Negara Nomor 005/BA-OP/6172/2023 Tanggal 31 Desember 2023, Rekonsiliasi Internal Barang Milik Negara Nomor 006/RT.01.2-BAR/6172/2023 Tanggal 31 Desember 2023.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang terdiri dari kotak dan bilik suara dan Alat Kelengkapan Pemungutan Suara.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	1.032.918.892	-
Jumlah	1.032.918.892	-

*Peralatan dan
Mesin
Rp2.252.544.882*

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp1.867.833.082 dan Rp1.867.833.082. Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin terdapat mutasi Penurunan sebesar Rp343.427.500,- yaitu Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dari operasional Pemerintah. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.252.544.882
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	2.252.544.882
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-1.719.255.662
Nilai Buku per 31 Desember 2023	533.289.220

*Gedung dan
Bangunan
Rp905.430.190*

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Kantor serta Gudang diperoleh Tahun 2005 sesuai SPK Nomor 640/01.SPK/PL-KPU/IX/2005 Tanggal 08 September 2005. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp905.430.190 dan Rp905.430.190 . Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	905.430.190
Mutasi tambah:	-
Pembangunan tambahan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	905.430.190
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(158.134.206)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	747.295.984

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp11.950.000*

C.7 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.950.000 dan Rp11.950.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan,

Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	11.950.000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	11.950.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(5.178.334)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	6.771.666

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.882.568.202*

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp1.882.568.202,- dan Rp1.731.734.258. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.252.544.882	1.719.255.862	533.289.220
2	Gedung dan Bangunan	905.430.100	158.134.206	747.295.994
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.950.000	5.178.334	6.771.666
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	3.168.925.072	1.882.568.202	1.287.356.870

*Piutang
Jangka
Panjang Rp.0*

C.9 Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang merupakan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar Rp.0,.

*Kewajiban
jangka Pendek
Rp0*

C.10 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Kewajiban jangka pendek merupakan Belanja pegawai yang Masih Harus Dibayar.

*Utang yang
belum diterima
tagihannya
Rp14.945.400,-*

C.10.2 Utang yang belum diterima tagihannya

Utang yang belum diterima tagihannya per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.945.400,- dan Rp0. Utang yang belum diterima tagihannya merupakan Belanja Barang bulan Juni 2023 yang belum di GUP kan dan menjadi transaksi gantung.

*Aset Lain-Lain
Rp343.427.500*

C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp343.427.500 dan Rp343.427.500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	343.427.500
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 31 Desember 2023	343.427.500
Akumulasi Penyusutan	(341.026.660)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.400.840

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp341.026.660*

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp341.026.660 dan Rp339.644.990. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	343.427.500	341.026.660	2.400.840
Jumlah	343.427.500	341.026.660	2.400.840

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp11.861.772.232,-*

C.14 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 11.861.772.232 dan Rp 1.057.261.524. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP Rp0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pemindahtanganan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pemindahtanganan	-	-	#DIV/0!
Pendapatan lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!

*Beban Pegawai
Rp2.349.219.133*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.349.219.133 dan Rp2.208.607.238. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	565.960.000	828.071.158	-31,67
Beban Tunjangan-tunjangan	1.783.358.233	1.380.536.080	29,18
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	#DIV/0!
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	2.349.219.133	2.208.607.238	6,37

*Beban
Persediaan
Rp6.997.000,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.997.000 dan Rp 65.404.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	6.997.000	65.404.000	-89,30
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	-	#DIV/0!
Jumlah	6.997.000	65.404.000	-89,30

*Beban Barang
dan Jasa
Rp6.587.684.005*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.587.684.005 dan Rp432.256.262. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	141.629.900	352.975.500	(59,88)
Beban Langganan Daya dan Jasa	533.121.809	40.300.112	1222,88
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional lainnya	5.775.201.598	15.640.000	###8888
Beban Jasa Profesi	5.500.000	-	#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	132.230.699	21.160.680	524,89
Beban Aset Ekstrakontabel Peralatan dan Mesin	0	2.180.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakontabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakontabel Aset Tetap Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	6.587.684.005	432.256.292	1424,02

*Beban
Pemeliharaan
Rp204.751.270*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 204.751.270 dan Rp 141.188.030. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya

penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.660.000	14.879.000	92,62
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.091.270	126.309.030	39,41
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	204.751.270	141.188.030	45,02

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.105.692.302*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.105.692.302 dan Rp1.031.650.489. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Peningkatan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.255.642.302	754.256.489	66,47
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	156.230.000	1.650.000	9368,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	693.820.000	275.744.000	151,62
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	2.105.692.302	1.031.650.489	104,11

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp152.215.614

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp152.215.614 dan Rp138.784.579. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rinciannya Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	126.859.146	111.413.051	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.576.464	23.576.464	-
Beban Penyusutan Jalan, Higasi, Jaringan	398.334	398.334	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.381.670	3.396.730	-
Jumlah Penyusutan	152.215.614	138.694.579	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	152.215.614	138.694.579	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.359.864

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	#DIV/0!
Penjualan Alat Kantor	0	0	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun yang lalu	0	1.465.000	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset lainnya*)	3.359.864	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3.359.864	1.465.000	101,79

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.057.261.524

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.057.261.524 dan Rp1.099.104.603

Defisit LO
Rp11.403.199.470

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp11.403.199.470 dan Rp4.016.225.598. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp0

E.3 Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar yaitu koreksi atas reklasifikasi persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Transaksi Antar Entitas Rp22.207.710.178

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp22.207.710.178 dan Rp3.974.382.519. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.228.472.660
Transfer Masuk	851.145.518
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	9.128.092.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	22.207.710.178

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari Pendapatan dan Belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN).

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp12.228.472.660.

E.4.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023, sebesar Rp851.145.518,- terdiri dari :

Transfer Masuk Antar Entitas

JENIS	ENTITAS ASAL	NILAI
Peralatan dan Mesin		
Persediaan	0	851.145.518
Jumlah		851.145.518

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp9.128.092.000,-

E.4.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp10.804.510.708.

Ekuitas Akhir

Rp11.861.772.232

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.861.772.232 dan Rp1.057.261.524.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

Selama periode berjalan, *Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebesar Rp 2.858.546.000,- di revisi sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) kali revisi, Revisi ke 01 tanggal 31 Januari 2022 mengalami revisi DJA menjadi sebesar Rp 2.858.546.000,- Pada tanggal 13 Mei 2022 mengalami revisi 2 yaitu Revisi POK, tanggal 13 Juni 2022 mengalami Revisi 3 yaitu Revisi POK, tanggal 6 Juli 2022 revisi 4 yaitu revisi POK, tanggal 22 Juli revisi 5 yaitu revisi POK, tanggal 18 Agustus 2022 revisi 6 yaitu revisi POK, tanggal 5 September 2022 revisi 7 yaitu revisi DJA sebesar Rp. 4.005.408.000,-, tanggal 27 September 2022 revisi 8 yaitu revisi POK, tanggal 6 Oktober 2022 revisi 9 yaitu revisi POK, tanggal 8 November 2022 revisi 10 revisi DJA sebesar Rp 3.995.111.000, tanggal 22 November 2022 revisi 11 yaitu revisi POK, tanggal 23 November 2022 revisi 12 yaitu revisi POK, tanggal 25 November 2022 revisi 13 yaitu revisi POK,

tanggal 26 November revisi 14 dan 15 yaitu revisi POK, tanggal 5 Desember 2022 revisi 16 yaitu revisi POK, tanggal 11 Desember 2022 revisi 17 dan 18 yaitu revisi POK, tanggal 14 Desember 2022 revisi 19 yaitu revisi POK, tanggal 17 Desember 2022 revisi 20 yaitu revisi POK tanggal 26 Desember 2022 revisi 21 revisi DJA sebesar Rp 4.037.234.000,-, tanggal 17 Januari 2023 revisi 22 sebesar Rp. 4.011.734.000,- yaitu revisi kanwil. Revisi antar satker untuk pagu belanja pegawai minus. Revisi 23 tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 12.216.857.000,-, Revisi 24 tanggal 11 Desember 2023, Revisi 25 tanggal 18 Desember 2023, Revisi 26 tanggal 19 Desember 2023. Revisi 27 tanggal 26 Desember 2023, Revisi 28 tanggal 22 Januari 2024 yaitu revisi pagu minus.

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, maka Komisi Pemilihan Umum mendapat persetujuan pembukaan rekening atas nama KPU Kota Singkawang (658546) dan mendapat surat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-5057/WPB.12/KP.04/2020 tanggal 21 September 2020 dengan nama **"Bpg 093 Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang 658546" No. Rekening 651896585461000** pada PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk. CABANG SINGKAWANG.

Selain itu KPU Kota Singkawang juga membuka Rekening Badan Adhoc untuk menyalurkan dana Tahapan Pemilu Tahun 2024 khususnya Badan Adhoc, dengan Surat Persetujuan Nomor 093098 tanggal 6 Maret 2023 dengan nama **RPL 093 KPU KOTA SINGKAWANG** No. Rekening

**654086585462900 pada PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk.
CABANG SINGKAWANG.**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 07 Tahun 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Arif Sunandar, S.Sos
Pejabat Pembuat Komitmen	: A. Gadis Kinanti, S.IP
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ridhwan Wakhyulmuluk
Bendahara	: Rini Syintasari
Staf Pengelola	: - Fivesa Zuriana - M. Yazdi Putranda, A.Md

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Selama periode berjalan terdapat beban barang yang harus dibayar yaitu tagihan PDAM bulan Desember 2023, yang tagihannya baru akan terbit bulan Januari 2024 sebesar Rp246.370.

- Terdapat ketidaksesuaian akun atas pengadaan belanja ekstrakomptabel berupa Pengadaan Apar, CCTV dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi.
- Pada tanggal 23 Oktober 2023 KPU Kota Singkawang dan Pemerintah Kota Singkawang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk keperluan Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Walikota Singkawang senilai Rp 22.820.230.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Pemberian hibah uang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.128.092.000,- (sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.692.138.000,- (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Pencairan Hibah Tahap Pertama sebesar Rp. 9.128.092.000, telah dilakukan pengesahannya di KPPN Singkawang.